

IKHTISAR

Hak Anak Di Luar Perkawinan (Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Dalam fiqh munakahat telah jelas kedudukan seorang anak sesuai dengan bagaimana proses keberadaannya dalam sebuah keluarga. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pemaknaan lain terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi setelah lahirnya putusan tersebut anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara memahami isi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Uji Materil atas pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Tahun 1974 terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil Penelitian ini dikemukakan secara singkat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut fiqh munakahat hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitu pun menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, hal ini berarti pemenuhan hak terhadap anak tersebut menjadi tanggungjawab bagi ibunya. Akan tetapi setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan tidak hanya dengan ibunya, tetapi memiliki hubungan pula dengan ayah biologisnya, tepatnya hanya sebatas hubungan keperdataan saja. Dengan dilakukan pembuktian terlebih dahulu tidaklah dibenarkan oleh fiqh munakahat apabila keberadaan putusan tersebut bermaksud untuk mengesahkan keberadaan anak di luar perkawinan yang sah, namun tidak menjadi permasalahan apabila putusan tersebut diartikan dengan hanya untuk memberikan hak keperdataan bagi anak di luar perkawinan yang sah dari ayah biologisnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan, sebagai suatu cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kekuasaan tersebut tertuang dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bahwa “Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang pemilihan umum..

Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), pasal tersebut menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, ia dapat berupa:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum public atau privat; atau
4. Lembaga negara

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Selain itu harus membuktikan terlebih dahulu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Apabila persyaratan yang tersebutkan di atas telah terpenuhi, maka dapat dilakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengabulkan suatu permohonan uji materiil Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang diajukan oleh "A" yang meminta putranya "I" agar diakui sebagai anak almarhum "M". Putusan yang dikeluarkan atas uji materiil ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini "A" mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya¹). Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum²).

Dalam hal ini, A sebagai pemohon telah dapat membuktikan terhadap syarat yang sebagaimana tertuang dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang bagaimana syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pemohon. Dengan begitu apa yang dimohonkan oleh A dapat dilakukan pemeriksaan.

Dalam permohonan tersebut tercantum amar yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. Selain itu menyatakan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Perkawinan bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian menyatakan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Dari apa yang dimohonkan (petitum) tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang dalam diktumnya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari sisi fiqih munakahat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Karena fiqih munakahat merupakan kajian dalam jurusan ahwal syakhsyah. Fiqih munakahat yang digunakan adalah fiqih munakahat yang merupakan mazhab syafi'iah, hal ini karena sebagian besar masyarakat indonesia lebih cenderung terhadap mazhab tersebut.

Dari putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat pemaknaan lain atas bunyi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang awalnya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dengan adanya putusan tersebut ayat ini dimaknai “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dituangkan dalam penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Uji Materil Atas Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian tersebut adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak di luar perkawinan dalam fiqih munakahat dan menurut Undang-Undang Perkawinan?

2. Bagaimana kedudukan anak di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kedudukan anak di luar perkawinan dalam fiqih munakahat dan menurut Undang-Undang Perkawinan
2. Mengetahui kedudukan anak di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal menentukan kedudukan seorang anak. Sehingga tidak ada diskriminasi yang dilakukan kepada anak. walau bagaimanapun anak merupakan titipan dari tuhan sehingga harus dijaga dan dipelihara. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat menarik minat peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.

D. Kerangka Pemikiran

Kata “*munakahat*” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. “Bila kata “*fiqih*” dihubungkan kepada kata “*munakahat*”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam”.³

Selain aturan agama yang tertuang dalam fiqih sebagai hukum syar'i yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah SWT, adapun aturan yang ditentukan oleh negara. Peraturan-peraturan negara indonesia tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan daerah dan sebagainya. Adapun aturan negara tersebut sering dinamakan dengan hukum. Menurut Haryono⁴ “Hukum dibuat untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan bagi manusia”.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kenca, 2009) hlm. 5

⁴ Haryono, *Sumber Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional) hlm. 12

disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat”.⁵

Menurut Cik Hasan Bisri⁶ “Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai kekuasaan kehakiman telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya adalah sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

⁵ Ahmad Muja hid in, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007) hlm. 1

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tata n Masyarakat Indonesi*, (Bandung : PT Re maja Rosda ka rya, 2000) hlm. 36

Produk dari sebuah pengadilan adalah putusan. Putusan disebut juga dengan *Vonnis* dalam bahasa Belanda atau *al-qada'u* dalam bahasa Arab⁷. Menurut Umar Mansyur Syah⁸ putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim - sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu - diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam sebuah putusan dikenal dengan penerapan hukum dan penemuan hukum.

Penerapan hukum adalah putusan yang didalamnya merupakan penerapan atas peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku terhadap suatu putusan sesuai dengan keadaan dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini artinya peraturannya sudah ada dan sudah jelas, dan hakim hanya menerapkan aturan-aturan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisinya, hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 199

⁸ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Garut: Al-Umaro, 1998) hlm. 172

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Selain itu, putusan juga merupakan sebuah penemuan hukum. Artinya dalam sebuah putusan posisi hakim bukan hanya sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah ada dan jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, melainkan membuat putusan dengan memperluas makna suatu ketentuan antara peraturan dan perundang-undang yang ada dengan keberadaan peraturan yang juga hidup dan berkembang dalam masyarakat hal ini berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan atas perubahan keduanya yaitu dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang adalah mengenai keabsahan seorang anak. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar

perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dan dijelaskan dalam pasal 42 dan pasal 43. Yaitu sebagai berikut: Pasal 42 menyatakan bahwa “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan pasal 43 menyatakan bahwa : Ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 99 dan pasal 100. Pasal 99 mengatakan bahwa “Anak yang sah adalah : Ayat (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ayat (2) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 menyatakan bahwa: “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Terkait dengan sebuah perkawinan yang sah, hal itu pun telah diatur dengan jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekwensi hukum, baik kepada suami maupun istri yang telah menikah secara sah dan begitupun terhadap anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut. Selain itu menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Seperti yang telah diuraikan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa keabsahan sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama. Maka sebagai seorang muslim. Harulah melakukan perkawinan yang sesuai atas aturan yang telah ditentukan dalam hukum islam. Yaitu memenuhi setiap rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk terpenuhinya sebuah perkawinan yang sah. Rukun dan syarat tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 sampai dengan pasal 29.

Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya, kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁹

Sedangkan rukun dari sebuah pernikahan terdiri dari lima, yaitu Calon suami dengan syarat-syaratnya, calon istri dengan syarat-syaratnya, shigat ijab dan qabul dengan syarat-syaratnya, wali calon pengantin perempuan dengan syarat-syaratnya kemudian dua orang saksi dengan syarat-syaratnya. Yang termasuk dari persyaratan disini adalah. Ketentuan yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap rukun tersebut.

Rukun dan syarat yang telah ditentukan menjadi suatu tolak ukur bagi sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Dimana keabsahan suatu perkawinan nantinya akan menentukan kedudukan bagi seorang anak yang lahir ditengah pernikahan tersebut. apakah anak tersebut digolongkan sebagai anak yang sah atau menjadi anak luar perkawinan sesuai dengan pasal 42 dan pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 63

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN

A. Kedudukan dan Hak Anak dalam Fiqih Munakahat

1. Kedudukan Anak dalam Fiqih Munakahat

Sebelum memahami tentang kedudukan seorang anak, harus difahami terlebih dahulu makna dari fiqih munakahat. Menurut Amir Syarifuddin¹⁰ “Fiqih munakahat merupakan murakkab idhafi dari kata “*fiqh*” dan “*munakahat*”. Fiqh adalah suatu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur’an, yang secara etimologi berarti “paham”.

Mohammad Daud Ali¹¹ mengatakan bahwa ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadis. Dengan kata lain, ilmu fiqih, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit* , hlm. 2

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 43

hukum yang terdapat didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Amir Syarifuddin¹² menerangkan mengenai “pendapat Ibnu Subki dalam kitab Jam'al-Jawami' yang mengartikan fiqih sebagai berikut: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية yang berarti “pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili”.

Kata “Munakahat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. term ini disebut dalam bentuk jama' mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan setelah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian, “munakahat” itu lebih tepat disebut “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”. Bila kata “fiqih” dihubungkan kepada kata “munakahat”, maka

¹² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 2

artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliah *furu'iyah* berdasarkan wahyu illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam.¹³

Dapat dikatakan bahwa fiqih munakahat merupakan suatu aturan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang tata cara bagaimana perkawinan dapat dilaksanakan, dengan syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Tentunya aturan-aturan tersebut telah secara langsung diatur dalam al-Qur'an dan hadis, dimana aturan-aturan tersebut tidak boleh satupun terlewatkan. Karena apabila salah satu dari hal tersebut terlewatkan maka akan mengakibatkan hukum suatu perkawinan tidak sah atau bahkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Para ulama mazhab mengemukakan pendapat-pendapat mengenai pemahaman yang mereka miliki terhadap fiqih yang membahas mengenai perkawinan. Sehubungan dengan banyaknya pendapat terhadap hal tersebut, penulis bermaksud untuk lebih fokus kepada pembahasan fiqih munakahat yang dibahas oleh Imam Syafi'i.

¹³ AmirSyarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 5

“Secara lughawi (bahasa), nikah berarti bersenggama atau bercampur sehingga dapat dikatakan terjadi perkawinan diantara dahan-dahan, apabila dahan-dahan tersebut terjadi saling bergesekkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian majazi, nikah disebutkan untuk arti akad karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan perisetubuhan”.¹⁴

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah¹⁵ “Para ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad”. Adapun Menurut Slamet Abidin & Aminuddin¹⁶ “Ulama syafi’iah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj نكاح – زوج yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya”.

¹⁴ Abu Sahla & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011) hlm. 17

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007) hlm. 309

¹⁶ Slamet Abidin & Aminuddin, *Op. Cit.*, hlm. 10

Amir syarifuddin¹⁷ Mengemukakan mengenai arti “Terminologi di kalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

عقد يتضمن باحة الوطاء بلفظ الإنكاح أو الزودج

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”. Abu Sahla & Nurul Nazara¹⁸ mengemukakan pula pengertian yang dikeluarkan oleh Imam Syafi’i. Yaitu “Menurut Ulama Syafi’iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna wathi’ (untuk memiliki kesenangan) disertai lafaz nikah, kawin, atau yang semakna”.

Banyaknya pemahaman yang dilakukan oleh para ahli terhadap pengertian yang dikeluarkan oleh ulama syafi’iyah. Secara keseluruhan pengertian-pengertian tersebut memiliki inti yang sama. Bahwasannya perkawinan menurut ulama syafi’iyah adalah suatu akad yang mengandung maksud untuk memperbolehkan dalam berhubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha, za-wa-ja, kawin.

“Perkawinan adalah fitrah manusia maka Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan

¹⁷ AmirSyarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 37

¹⁸ AbuSahla & NurulNazara, *Op. Cit.*, hlm. 17

jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan maka dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju *kesesatan*".¹⁹. Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Hal tersebut jelas terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 1:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَلَوَاتُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

Seluruh mazhab fiqih, baik Sunni maupun Syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, surat al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu:

.... وَخَلَقَهُ وَفَصَّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."

¹⁹ Abu Sahla & Nurul Nazara, *Op. cit.*, hlm. 35

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusui itu lamanya dua tahun penuh.

...وَفَصَّالُ فِي عَامَيْنِ...

Dan menyapihnya dalam dua tahun.²⁰

Anak dalam sebuah keluarga memiliki kedudukan masing-masing sesuai dengan bagaimana cara kehadiran mereka ada dalam sebuah keluarga tersebut. Berikut adalah kedudukan seorang anak dalam sebuah keluarga berdasarkan fiqih.

a. Anak Sah

Tampaknya fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 385

yang sah.²¹ Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat agar nasab seorang anak dianggap sah, yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
- 2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
- 3) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut.

b. Anak Syubhat

Mengenai kedudukan anak syubhat dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah²². Bahwa percampuran syubhat ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri. Hubungan syubhat ini ada dua macam: syubhat dalam akad, dan syubhat dalam tindakan (perbuatan)

²¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 276

²² Ibid hlm. 389

- a. Syubhat dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut fasid karena satu dan lain alasan.
- b. Syubhat dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seseorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram untuk dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah istrinya, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu bukan istrinya.

“Kalau ke-syubhat-an tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan (nasabnya) pada keduanya. Sedangkan bila hanya terjadi pada salahsatu pihak, maka anak tersebut dikaitkan

nasabnya hanya pada orang yang mengalami ke-syubhat-an, dan ditiadakan dari yang tidak mengalaminya”.²³

c. Anak Hasil Mut'ah

Dikemukakan oleh Murtadha Mutahhan²⁴ bahwa “nikah *mut'ah* adalah suatu perkawinan yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk jangka waktu tertentu”. “Anak *mut'ah* adalah anak sah berdasar syara'. Dia memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak sah lainnya, tanpa ada pengecualian, baik hak-hak syara' maupun norma”.²⁵

d. Anak Zina

Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama.²⁶ Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat dari perbuatan zina. Dimana anak zina disebut juga sebagai anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak sah.

²³ Ibid hlm. 391

²⁴ Murtadha Mutahhan, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: ya pi, 1989) hlm. 18

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 394

²⁶ Ridwan AZ, *Pengertian Zina, Dampak Negatif Perzinaan dan Cara Menghindarinya*, dikutip dari:
<http://ridwanaz.com/islami/pengertian-zina-dampak-negatif-perzinaan-dan-cara-menghindar-zina>,

“Para ulama mazhab sepakat bahwa, bila zina itu telah terbukti dalam pengertian yang sebenar-benarnya dan dengan cara seperti yang telah dijelaskan tadi, maka tidak ada hak waris-mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya. Sebab, anak tersebut, secara *syar’i* tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya”.²⁷

c. Anak Temuan (Laqīth)

Dalam kitab “Niḥāyatul Muḥtaḥ” dalam fiqh Syafi’iyah: Laqīthh secara *syara’* adalah anak kecil yang dibuang di jalan dan tidak ada yang mengakuinya.²⁸ “Yang dimaksud dengan anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa menemukan kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak itu diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan itu”.²⁹

²⁷ Ibid hlm. 39-6

²⁸ Alfagerardi, *Anak Temuan*, Dikutip dari:
<http://islamind.blogspot.com/2011/12/anak-temuan.html>.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 397

f. Anak Adopsi (Tabani)

Anak angkat menurut bahasa arab dikenal dengan istilah tabani yang memiliki pengertian sama dengan adopsi. Tabani adalah suatu kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah dan permulaan Islam. Maksudnya apabila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah terhadap anak itu hukum-hukum yang berlaku atas anaknya sendiri.³⁰

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Syariat Islam, tidak menjadikan adopsi sebagai sebab bagi terjadinya hak waris-mewarisi. Sebab, adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain.³¹

2. Hak Anak dalam Fiqih Munakahat

Seorang anak yang lahir dalam sebuah keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hak yang dimiliki oleh seorang anak sesuai dengan kedudukannya di dalam

³⁰ Lia Hidayati, *Anak Zina, Anak Pungut dan Anak Angkat*, Dikutip dari: <http://liahidayati.blogspot.com/2012/06/anak-zina-anak-pungut-dan-anak-angkat.html>,

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 398

keluarga. Dimana seorang anak yang sah tidak dapat disamakan haknya dengan seorang anak angkat ataupun anak zina. salah satu hak anak-anak Muslim yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain adalah hak untuk hidup.³² Anak-anak dalam Islam juga mempunyai hak memperoleh pengesahan.³³ Seorang anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya, hal tersebut disebut juga dengan istilah *hadhonah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 1 sebagai ketentuan umum, bahwa “*hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Selain dari apa yang telah disebutkan, seorang anak yang lahir dalam sebuah perkawinan yang sah memiliki hak untuk mewarisi harta benda orang tuanya sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum *syara'*. Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang tidak sah atau bahkan sama sekali tidak ada hubungan perkawinan yang biasa disebut dengan anak zina tidak memiliki hak saling mewarisi antara anak tersebut dengan ayahnya. Anak yang dimaksud tersebut hanya memiliki

³² Hammudah 'Abd. Al'Ati, *Keluarga Muslim: Alih bahasa The family Structure in Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 241

³³ *Ibid* hlm. 246

hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. selain daripada itu “seluruh ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan”.³⁴

Berkaitan dengan adopsi atau pengangkatan anak, bahwa hal tersebut tidak semata-mata menjadikan hak waris mewarisi antara orang tua yang mengadopsi dan anak yang diadopsi. Sebab, adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain.³⁵

Menurut H. Zahry Hamid yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma³⁶ “Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadhanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain”.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *loc. Cit.*, hlm. 397

³⁵ *Ibid* hlm. 398

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 134

B. Kedudukan dan Hak Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

1. Kedudukan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan tidak hanya diatur dalam aturan agama saja, akan tetapi perkawinan pun diatur dalam peraturan negara. Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu peraturan yang lebih khusus bagi orang yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”³⁷. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 2 bahwa “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³⁸. Semua ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, baik rukun dan syarat yang harus dipenuhi tercantum dengan sangat jelas didalamnya.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

Sehingga sebuah perkawinan tidak hanya sah menurut agama, akan tetapi sah pula secara hukum negara.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya, walaupun ikatan yang timbul bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, karena hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perkawinan adalah hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Yakni hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain dari perkawinan, Undang-Undang Perkawinan pun mengatur mengenai hal anak sebagai akibat dari adanya sebuah perkawinan. disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian disebutkan pula dalam pasal 43 ayat (1) bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Diketahui dari uraian tersebut, bahwa kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dikategorikan kedalam dua. Yaitu anak sah dan anak diluar perkawinan yang sah.

1. Anak sah adalah seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah. Dimana suatu perkawinan akan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya sebagai mana telah ditentukan dalam peraturan tersebut.

Perkawinan dapat dikatakan sah oleh negara apabila telah terpenuhi bagian dari pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perkawinan. yang isinya adalah sebagai berikut ayat (1) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku”. Setelah kedua hal dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam sebuah perkawinan, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut sah secara hukum agama dan sah pula secara hukum negara.

2. Anak diluar perkawinan yang sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perkawinan yang tidak sah. Hal ini dapat disebabkan karena perkawinan orang tua dari anak tersebut merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan baik secara agama ataupun secara hukum negara. Dapat pula diakibatkan karena perkawinan tersebut melanggar pasal yang telah ditentukan oleh undang-undang yang telah mengaturnya.

Terkait dengan sah tidaknya seorang anak harus dilakukan karena menurut Abdulkadir Muhammad³⁹ mengatakan bahwa “Pembedaan ini perlu untuk mengurangi kemungkinan terjadi kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga ada hubungannya dengan hak mewarisi”.

Dikatakan Oleh Subekti⁴⁰ bahwa “si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan istrinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Disini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu”. Dalam hal terkait terhadap penyangkalan seorang anak diatur dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut (1) “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut”. (2) “pegadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 73.

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984) hlm. 49.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang anak yang dilahirkan, selalu tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau bahkan sama sekali tidak pernah ada perkawinan akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah.

Sebenarnya, permasalahan mengenai kedudukan anak dalam aturan Undang-Undang Perkawinan masih simpang siur. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dari bunyi pasal tersebut menimbulkan banyak penafsiran. Terkait dengan kalimat “anak yang dilahirkan diluar perkawinan” mengandung makna seperti apa? Apakah yang dimaksud diluar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, atau termasuk kedalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada suatu proses perkawinan yang tidak

didaftarkan sesuai dengan syarat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Jika diterjemahkan secara parsial bunyi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 42. Maka anak yang dibenihkan dalam suatu perkawinan yang sah namun ketika anak tersebut lahir perkawinan orang tuanya telah putus. Maka anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya karena anak tersebut lahir diluar perkawinan.

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri”, namun sampai dengan saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan peraturan terkait atas kedudukan anak luar kawin. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin.

2. Hak Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Mengenai hak yang dimiliki oleh seorang anak dalam sebuah perkawinan diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam undang-undang

tersebut dikemukakan bahwa seorang anak memiliki hak untuk dipelihara dan mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya dari kedua orang tuanya. hak tersebut harus terpenuhi hingga anak itu melakukan perkawinan atau hingga dapat berdiri sendiri. Hak-hak tersebut harus terus terpenuhi walaupun perkawinan diantara orang tuanya telah putus karena mengalami perceraian. Disamping kewajiban itu, "orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan".⁴¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat perbedaan hak yang dimiliki oleh seorang anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dengan hak yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Anak yang sah memiliki hubungan perdata kepada kedua orang tuanya dan memiliki hak yang harus terpenuhi oleh kedua orang tuanya. termasuk saling mewarisi satu sama lainnya. Namun, anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan hanya bisa saling mewarisi dengan ibunya saja. Hal tersebut

⁴¹ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980) hlm. 34

sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Terkait dengan pengangkatan terhadap anak terdapat aturannya dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Yang menyatakan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

C. Kedudukan dan Hak Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Kedudukan Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi menyelesaikan permasalahan dalam hal permohonan mengenai kedudukan seorang anak. dimana permohonan tersebut terselesaikan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun duduk perkara dari permohonan tersebut adalah bahwa A sebagai Pemohon merupakan pihak yang secara tidak langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2)

dan Pasal 43 ayat (1). Keberadaan pasal ini menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon terkait atas status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinannya.

Pasal yang dianggap telah melanggar dan merugikan hak konstitusi Pemohon adalah Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat pengesahan atas pernikahan dan mendapatkan status hukum untuk anaknya. Namun hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk kepada norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah setiap orang

memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari pasal tersebut adalah adanya persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari anak tersebut adalah sah dihadapan hukum serta tidak dilakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon menjadi anak diluar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan anak yang terlantar saja, yang status orang-tuanya

tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh Undang-Undang Perkawinan.

Dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terlebih dahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan. berdasarkan duduk perkara tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan agar menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil permohonannya. Selain itu, Pemohon pun mengajukan keterangan ahli untuk didengar keterangannya, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta berdampak

pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka pernikahannya menjadi tidak sah.

Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya.

Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat

individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain.

Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat dan bukan dianggap sebagai anak kandung.

Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' untuk menaati ulil amri (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri). Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengandung madharat, tetapi menghapusnya juga

menimbulkan madharat, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh mahkamah konstitusi atas Permohonan tersebut adalah bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo, Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusional adalah mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstutionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salahsatu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan tersebut.

Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya. Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Dengan melakukan pemeriksaan secara seksama dan bukti-bukti yang diberikan atas kedudukan hukum (legal standing) serta memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon,

menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud oleh Pemohon atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut.

Oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan tersebut, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pokok permohonan. Diketahui bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.

Terhadap permasalahan hukum pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan tentang asas-asas atau

prinsip-prinsip perkawinan menyatakan "...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Perkawinan di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyaperkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyaperkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif

negara. Pencatatan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kedua, Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksud agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta

otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang dimiliki pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas

dari soal prosedur/administratif perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan tersebut. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari permohonan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus

dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Kemudian, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dari apa yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut diketahui bahwa ada perubahan kedudukan yang dimiliki oleh anak yang lahir diluar perkawinan. Terkait atas keabsahan perkawinan dari orang tuanya. Dapat dimaknai berdasarkan putusan tersebut bahwa kedudukan anak dapat dikategorikan kedalam dua kedudukan, yaitu anak yang sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan anak diluar perkawinan berdasar pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusional tersebut. Kini anak yang lahir diluar perkawinan bukan hanya memiliki hubungan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja. Melainkan anak tersebut dapat memiliki hubungan perdata terhadap ayah

dan keluarga ayahnya, hal ini terlihat dengan adanya pemaknaan yang keluar dari amar putusan tersebut yaitu “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tentunya hubungan tersebut harus memenuhi pula syarat yang telah ditentukan. Yaitu dengan adanya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang dapat membuktikan anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menjadi ayahnya.

2. Hak Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada mulanya dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan seorang anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan kedudukan anak sekaligus sebagai uji materil atas pasal 43 tersebut, maka pasal tersebut mengalami perubahan dan

menjadikan kedudukan yang dimiliki oleh seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah pun mengalami perubahan. Dimana, sejak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. akan tetapi memiliki hubungan perdata pula dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kedudukan anak membuat perubahan yang sangat besar terhadap kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Tidak hanya memiliki hak yang harus terpenuhi oleh ibunya saja, namun dengan adanya putusan tersebut hak yang dimiliki anak tersebut harus terpenuhi pula oleh sang ayah. Dimana kedudukan ayah dari anak tersebut harus dapat dibuktikan dan dibenarkan bahwa ayah tersebut adalah benar sebagai ayah biologis dari sang anak. Sebagaiman telah disebutkan bahwa pembuktian kebenaran seorang ayah dapat dibuktikan dengan cara ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dibenarkan menurut hukum dan dapat membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan ia berhak untuk

mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya. Seorang anak dan ibunya berhak dan terbuka peluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang telah membenihkannya. Hal ini berdasar atas putusan pengadilan apabila laki-laki tersebut dinyatakan terbukti sebagai ayah biologis dari anak yang dimaksud. Maka sejak adanya putusan dari pengadilan seorang laki-laki sebagai ayah biologis dari seorang anak berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak biologisnya dalam bentuk pemberian nafkah baik untuk pemeliharaan maupun pendidikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjamin kebenaran dan pertanggungjawaban ilmiah dalam penelitian ini, maka aspek epistemologis (dari kegiatan penelitian ini) mutlak diperlukan. Aspek epistemologis yang dimaksudkan tersebut mempersoalkan mengenai cara bagaimana peneliti mendapatkan pengetahuan dari masalah yang diteliti. Aspek ini sangat relevan dengan metode penelitian yang dipakai untuk mengkaji pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan pada bagian ini di bagi atas 4 bagian, yakni : pertama metode penelitian; kedua sumber data penelitian; ketiga jenis data; keempat metode pengumpulan data; lima analisis data.

A. Metode Penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri⁴² Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berfikir. Disamping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik

⁴² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 58

dengan tahapan kerja yang dibutuhkannya maupun kelemahan dan kekuatannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴³

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe Deskriptif analitis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

B. Sumber Data Penelitian

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder⁴⁴. Dalam

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

⁴⁴ Cik Hasan Bisi, *Op. Cit.*, hlm. 64

penelitian ini, sumber data primer berupa salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber data sekunder berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

C. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dalam konteks naturalistik. Denzin dan Lincoln⁴⁵ mendefinisikan penelitian kualitatif :

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of meaning people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical material—case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and

⁴⁵ Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, London: SAGE Publications, 1998, hal. 15

visual texts-that describe routine and problematic moments *and meaning in individuals' lives*.

Disebut penelitian naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat "natural- atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi diatur dengan eksperimen atau test",⁴⁶. Sujana & Ibrahim⁴⁷ mengemukakan bahwa "Kualitatif lebih menekankan pada proses bukan pada hasil." Maksud dari proses tersebut sebagaimana definisi penelitian kualitatif disebutkan cresswell⁴⁸ "Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes word, reports detailed views of informants, and conducts the study in natural setting.

Sementara Bogdan dan Biklen⁴⁹ mengemukakan bahwa penelitian kualitatif lebih berusaha memahami dan menafsirkan apa makna pendapat dan perilaku yang ditampilkan manusia dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

⁴⁶ Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.1988, hlm.18

⁴⁷ Sujana & Ibrahim. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.1989, hlm. 189

⁴⁸ Cresswell, *op.cit.*, hlm.15

⁴⁹ Biklen dan Bogdan. *Qualitative Research for Education*. 1982. hlm. 31

Peran sebagai instrumen utama mengharuskan peneliti untuk aktif mengamati secara langsung dipelbagai peristiwa dan kegiatan yang terjadi dalam penelitian. Peneliti melibatkan diri secara langsung sebagai instrumen, karena dengan melibatkan diri langsung data yang diperoleh akan lebih bermakna. Kemudian data yang terkumpul secara totalitas akan memberikan kesatuan konteknya sehingga dapat dipahami maknanya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan pula dengan masalah penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 63). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

- 1). Mengetahui kedudukan anak di luar perkawinan dalam fiqih munakahat dan menurut Undang-Undang Perkawinan,
- 2) Mengetahui kedudukan anak di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri⁵⁰ Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner dan pengamatan (obsevation).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta melakukan studi pustaka, yaitu dengan cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

⁵⁰ Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, hlm. 65

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menelaah isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Atas Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari literatur yang terkait dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Hak Anak Di Luar Perkawinan Menurut Fiqih Munakahat dan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Kedudukan dan Hak Anak Di Luar Perkawinan Menurut Fiqih Munakahat

Perkawinan akan menjadi sah apabila telah terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Keabsahan dalam perkawinan sangatlah penting karena hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya. Di antaranya adalah hak saling mewarisi, keterikatan antara hak dan kewajiban yang harus terpenuhi satu sama lain, dan tentunya keterkaitan nasab dalam hal keturunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, yaitu untuk mendapatkan anak. Status hukum yang timbul dari perkawinan nantinya akan mempengaruhi terhadap status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Ketika perkawinan tersebut sah, maka anak yang lahir pun akan menjadi sah dan mendapatkan hak-haknya serta

melakukan segala kewajibannya sebagai anak yang sah. Namun ketika perkawinannya tidak memiliki keabsahan, maka akan mengakibatkan ketidaksahan pula terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Keabsahan suatu perkawinan begitu penting karena akan menentukan status hukum bagi anak yang dilahirkan di dalamnya.

Islam begitu memberikan perhatian terhadap perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang untuk mencapai suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini begitu jelas terlihat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai salah satu tujuan dalam sebuah perkawinan. selain itu, perkawinan merupakan suatu cara untuk menghindari sebuah perzinahan. Dalam Islam hanya mengenal dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Hubungan suami istri dari perkawinan yang tidak sah dapat dikategorikan dengan zina.

Zina adalah melakukan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Akibat dari perbuatan zina tersebut nantinya akan sangat besar saat terlahir anak dari perbuatan

tersebut. Anak yang dilahirkan nantinya akan memiliki status sebagai anak yang lahir di luar perkawinan.

Muhammad Jawad Mughniyah⁵¹ menyebutkan bahwa para ulama menghadapi kesulitan besar dalam menentukan kedudukan bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Dari apa yang dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memiliki nasab secara syar'i terhadap laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang melahirkan anak tersebut. Hal tersebut tidak ada saling mewarisi satu sama lainnya. Nantinya, anak yang lahir di luar perkawinan tersebut tidak memiliki keterkaitan nasab dengan anak lain yang lahir dari laki-laki yang sama. Bahkan dengan tidak ada keterkaitan nasab tersebut mengakibatkan tidak ada larangan bagi ayah biologis yang akan menikahi anak perempuan hasil zinahnya, dan anak laki-laki yang lahir dari peristiwa tersebut tidak menjadi haram apabila akan menikahi kaka perempuannya atau bibinya dari pihak ayah biologis. Akan tetapi, sepanjang mereka dianggap tidak mahram, anak zina itu memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang sah sehingga seluruh haknya diberikan sebagaimana yang diberikan kepada anak

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op., Cit.* Hlm. 395.

yang sah lainnya. Namun, para ulama sepakat bahwa mereka tidak memiliki hak untuk saling mewarisi.

Imam Syafi'i mengatakan: seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya. Ini merupakan jalan keluar dari suatu kesulitan menuju kesulitan yang lebih besar lagi.⁵²

Banyak orang yang berfikir sempit terkait atas kelahiran anak akibat perbuatan zina atau terlahir di luar perkawinan yang sah. Mereka mendapat hukuman dari lingkungan sosial dengan statusnya sebagai anak haram, namun seperti apa yang diketahui bahwa dalam Islam tidak dikenal dengan anak haram, hal ini jelas adanya dengan keterangan *"kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah"*. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya memang merupakan suatu hal yang dilarang dan sesuatu yang diharamkan, namun ketika seorang anak lahir dari hubungan tersebut tidaklah sepantasnya harus menerima hukuman atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, karena dalam Islam tidak ada yang disebut dengan dosa keturunan. Tak ada satu pun anak yang dapat memilih dalam

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.* hlm. 397.

keluarga seperti apa mereka ingin dilahirkan, tentunya apabila pilihan itu ada maka tak satu pun anak yang ingin dilahirkan sebagai anak dari orang tua yang berzina. Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina, hal ini terbukti dengan adanya hukuman rajam bagi siapa saja yang melakukannya. Namun bukan berarti bahwa anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan dengan kedudukan orang tuanya.

Anak zina atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah telah sangat jelas kedudukannya dalam fiqh munakahat. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja dan hanya dapat saling mewarisi antara anak dan ibunya. Sedangkan dengan ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, tentunya hal tersebut mengakibatkan tidak ada saling mewarisi antara keduanya. Pemenuhan hak terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab ibunya, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi ayah biologisnya untuk memenuhi hak anak tersebut.

2. Kedudukan dan Hak Anak Di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Indonesia merupakan salah satu negara hukum, di mana setiap perbuatan yang dilakukan memiliki akibat hukum bagi

orang yang melakukannya. untuk menjaga ketertiban di antara satu dan yang lainnya maka dibentuklah suatu aturan, sebagai salah satu batasan agar kebebasan yang dimiliki seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat bukanlah kebebasan secara seutuhnya namu kebebasan yang dibatasi oleh aturan agar kebebasan tersebut tidak mempengaruhi kebebasan masyarakat lainnya dan tentunya kebebasan tersebut dapat terarah dan tidak dipergunakan seenaknya.

Salah satu hal yang diatur di negara Indonesia adalah mengenai Perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan aturan yang menjadi petunjuk untuk pelaksanaan perkawinan serta dijadikan sebagai pedoman oleh hakim di lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus permasalahan mengenai perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan, bagaimana cara pembatalan perkawinan, perwalian dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan hal tersebut. Di antara pembahasan dalam undang-undang ini adalah mengenai kedudukan seorang anak dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang agar perkawinan tersebut memiliki keabsahan secara agama dan diakui serta memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan suatu perkawinan sangatlah penting, karena akan berakibat besar terhadap harta yang dimiliki dan terhadap kedudukan anak yang lahir didalamnya.

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa kedudukan anak ini sangatlah berkaitan erat dengan keabsahan perkawinan dari kedua orang tuanya. Kedudukan anak dalam sebuah

perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43. Di mana dalam Pasal 42 dikatakan bahwa: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal ini mengandung banyak pemaknaan terhadap keberadaan seorang anak, mengingat dari penjelasan undang-undang ini bahwa pasal tersebut telah dianggap jelas, namun pada kenyataannya pasal tersebut masih memiliki makna yang meluas. Mungkin dari kalimat “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak menimbulkan masalah. Namun saat melihat kalimat “anak yang lahir dalam perkawinan yang sah”, kalimat tersebut dapat saja diartikan ketika pembenihan dilakukan di luar perkawinan yang sah namun saat dilahirkan ia berada dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dapat termasuk ke dalam status sebagai anak yang sah.

Dalam Pasal 43 ayat (1) dikatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kemudian ayat (2) menerangkan bahwa: “Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”. Keberadaan pasal ini pun memiliki makna yang meluas. Apabila Pasal 43 tersebut memiliki keterkaitan dengan pasal 42 mengenai anak sah, maka keabsahan anak tersebut

harus terikat dengan keabsahan pernikahan dari kedua orang tuanya. Sedangkan keabsahan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 42 tersebut tentunya memiliki keterikatan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan dengan harus terpenuhi kedua ketentuan tersebut. Sehingga saat salah satu ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan memiliki status sebagai perkawinan yang dianggap tidak sah. Sangat jelas apabila sebuah perkawinan tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) yaitu ketentuan agama maka perkawinan menjadi tidak sah, dan tentunya ketika seorang anak dilahirkan dalam perkawinan tersebut maka status yang dimiliki anak tersebut adalah anak yang tidak sah pula. Namun ketika perkawinan tersebut hanya sah dengan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) perkawinan tersebut dianggap tetap tidak sah dan akan melahirkan anak dengan status sebagai anak di luar perkawinan yang sah, sedangkan pada dasarnya sebuah keabsahan perkawinan tidak ada keterkaitan dengan sebuah pencatatan. Dari keterangan tersebut dapat dimaknai bahwa secara administratif pengertian anak sah menurut hukum negara adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan pencatatan atas perkawinan tersebut. Hal ini menurut negara apabila melakukan pernikahan

dengan terpenuhi pasal 2 ayat (1) saja dan mengabaikan keberadaan pasal 2 ayat (2), maka anak yang dilahirkan akan disamakan statusnya dengan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun, apabila pasal 43 hanya berdiri sendiri tanpa ada keterikatan dengan Pasal 42. Maka yang dimaksud dengan “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah” merupakan seorang anak yang terlahir dari orang tua yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 baik itu ayat (1) maupun ayat (2) atau tidak memiliki ikatan perkawinan sama sekali yang dalam hukum Islam disebut dengan zina.

Ketentuan mengenai pasal 43 ayat (1) menurut ayat (2) dalam pasal yang sama, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan anak tersebut akan dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan tentang hal itu secara spesifik dalam peraturan pemerintah manapun. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksana Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan mengenai prosedur pencatatan dalam perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan dengan hanya terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan mengabaikan atas ayat (2) pasal tersebut, hal tersebut jelas terdapat dalam masyarakat masa kini, fenomena semacam itu dikenal oleh khalayak umum dengan kawin siri. Pada dasarnya perkawinan

yang dilakukan telah sah karena telah terpenuhi ketentuan agama dalam hal keabsahan perkawinannya, namun dengan terabaikannya ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengakibatkan perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara dan dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat dari perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan tidak dilindungi oleh negara. Hal di atas berakibat besar terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, dan pada akhirnya anak tersebut dalam hal pemenuhan hak-haknya menyandang status sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan dimasukkan ke dalam golongan pasal 43 ayat (1), yaitu dengan hanya memiliki hubungan dengan ibu serta keluarga ibunya saja. Hak yang dapat diterima oleh anak dalam golongan tersebut pun nantinya hanya akan terpenuhi oleh ibunya saja dan terabaikan atas hak-hak dari ayahnya. Keberadaan anak tersebut memiliki kesamaan sebagaimana ketika seorang anak lahir dari orang tua yang sama sekali tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) maupun ayat (2) ataupun bahkan terlahir dari sebuah hubungan yang sama sekali tidak memiliki ikatan perkawina.

Pencatatan dalam perkawinan sangatlah penting, sebagai suatu bukti autentik bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah

perkawinan dan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum di hadapan negara, sehingga hak dan kewajibannya dapat dilindungi oleh negara. Hal ini dikarenakan negara Indonesia menganut asas legalitas, atau sering pula disebut dengan asas kepastian hukum. Dimana segala aktifitas yang dilakukan sebagai sesuatu yang teramat penting dilakukan pencatatan sebagai suatu bukti apabila pada suatu saat ada hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan konsep menurut Undang-Undang Perkawinan di Inonesia anak di luar nikah diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Anak yang dibuahi di luar perkawinan yang sah, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya anak itu dinasabkan kepada keduanya. Jikan anak tersebut lahir sebelum enam bulan maka anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya saja.
- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kategori anak ini disamakan dengan anak zina dan anak li'an.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini jelas

terdapat dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. dengan adanya hubungan tersebut tentunya pemenuhan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya saja.

B. Kedudukan dan Hak Anak Di Luar Perkawinan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut jelas terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan kedudukan seorang anak, pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan yang dimohonkan oleh "A" yang berkenaan dengan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"). Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum").

Permohonan yang diajukan tersebut disebabkan karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon hanya memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinan pemohon tidak memiliki akta pernikahan

sebagai akta otentik atas bukti terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui di hadapan negara. Tentunya hal tersebut berakibat kepada anak pemohon "T" yang terlahir dalam ikatan pernikahan tersebut dan "T" terkatégorikan ke dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Keberadaan "T" tidak diakui sebagai anak yang sah di hadapan negara karena menurut peraturan yang berlaku, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang sehingga termasuk ke dalam pernikahan yang tidak sah menurut hukum negara. Sehingga pada akhirnya "T" hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja serta pemenuhan hak atas "T" hanya terpenuhi oleh ibu dan keluarga ibunya.

Dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon, pemerintah dan DPR memberikan pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.. Dari apa yang disampaikan oleh semua pihak akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan yang isinya adalah merubah pasal 43 ayat (1) yang pada mulanya berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kemudian menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Ketentuan yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merubah kedudukan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan yang dimaksud dalam amar putusan ini adalah perkawinan yang hanya terpenuhi keabsahan perkawinan menurut aturan agama. Dimana sebuah perkawinan yang hanya terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan telah terabaikannya ayat (2) dari pasal tersebut. Pada awalnya seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah di hadapan negara hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tentunya hal tersebut berpengaruh dalam pemenuhan hak yang hanya terpenuhi oleh ibu dan keluarga ibunya, hal tersebut menyebabkan keberadaan anak yang lahir dari perkawinan tersebut disetarakan dengan kedudukan anak yang lahir akibat dari hubungan tanpa adanya pernikahan atau yang dikenal dengan zina. Namun kini setelah hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hubungan

anak yang lahir di dalam perkawinan yang dianggap tidak sah menurut negara tidak lagi hanya berhubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi memiliki hubungan pula dengan ayahnya serta berhubungan dengan segala hak yang harus terpenuhi oleh ayahnya tersebut. Tentunya selama hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang untuk terjalinnya hubungan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang secara hukum negara dianggap tidak sah dengan ayah biologisnya. Jalinan hubungan tersebut tentunya akan mengakibatkan adanya hubungan keperdataan di antara keduanya. Dengan adanya hubungan tersebut maka pemenuhan hak terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebagaimana disebutkan di atas bukan lagi hanya kewajiban ibunya akan tetapi sebagai ayah dari anak tersebut harus pula memberikan hak-hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, anak tersebut berhak mendapatkan biaya pemeliharaan, dan pendidikan dari ayahnya.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral baik di hadapan Islam maupun di hadapan negara. Dengan segala aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sisi tersebut antara

agama dan negara terhadap suatu ikatan perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan bukanlah hal yang sepele yang hanya dilakukan dengan begitu saja. Begitu pentingnya arti sebuah perkawinan, sehingga aturan-aturan terhadap perkawinan itu dibuat sedemikian rupa untuk dapat menjaga kesucian dari sebuah ikatan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam fikih munakahat dan negara menegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu khusus bagi orang yang menganut agama Islam di Indonesia aturan terhadap perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Dengan aturan yang ada mengenai ketentuan keabsahan dalam sebuah perkawinan tidak hanya harus diakui oleh agama. Namun demi memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara, maka suatu perkawinan pun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut aturan negara, dalam hal ini harus bersesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan dan bagi kalangan muslim harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat yang akan timbul dari sebuah perkawinan, baik yang berkaitan dengan harta maupun dengan kedudukan anak yang lahir dalam

perkawinan tersebut. Dalam hal ini keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) menyatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sebenarnya keabsahan perkawinan tidak ditentukan oleh perintah Pasal 2 ayat (2), karena pada hakikatnya suatu pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan sangat ditentukan oleh pasal 2 ayat (1) dimana setiap pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama, hal tersebutlah yang sangat menentukan atas keabsahan dari perkawinan. Pencatatan perkawinan tidaklah mengganggu keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam, karena pencatatan perkawinan hanya merupakan pelaksanaan administratif untuk kebutuhan negara sebagai bukti atas terjadinya suatu perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara dan tentunya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara, ini mengakibatkan

bahwa perkawinan tersebut tidak diakui di hadapan negara. Hal ini disebabkan karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan. Sehingga dengan tidak adanya bukti tersebut maka hak dan kewajiban dalam perkawinan tersebut pun tidak dapat dilindungi oleh hukum negara.

Pembuktian dengan menggunakan akta perkawinan sebagai bukti otentik dari sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan akibat-akibat hukum yang muncul dari sebuah perkawinan. Diantaranya adalah dalam menentukan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Keberadaan anak dalam perkawinan akan mudah dibuktikan karena adanya perkawinan yang mendahului proses kelahiran anak tersebut dengan adanya bukti akta nikah sebagai bukti otentik atas terjadinya sebuah perkawinan.

Dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memberi perubahan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan di dalam sebuah perkawinan yang tidak sah menurut negara, yaitu atas sebuah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan dan terabaikan atas pencatatan perkawinan tersebut yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materil atas Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan kedudukan seorang anak dalam sebuah perkawinan. Dengan hadirnya putusan ini, kedudukan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut pasal 43 mengalami perubahan. Di mana pada awalnya menurut pasal 43 ayat (1) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian mengalami perubahan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, namun memiliki hubungan juga dengan ayah dan keluarga ayahnya, tentunya hal itu harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi harus difahami terlebih dahulu mengenai maksud dari perkawinan yang tidak sah tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga isi dari putusan tersebut harus dipatuhi oleh keseluruhan masyarakat layaknya undang-

undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (3) yang di rubah ke dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menyatakan bahwa: "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan uji materi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan pasal tersebut, maka perubahan atas pasal tersebut menjadi norma hukum yang berlaku bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. Peraturan tersebut terkait tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya beserta segala konsekuensi yang ditimbulkannya.

Pada dasarnya untuk memahami sebuah putusan, harus diketahui terlebih dahulu persoalan awal yang menjadi latar belakang terbentuknya putusan tersebut. Sebenarnya kedudukan anak di luar perkawinan sudah jelas keberadaannya menurut Islam. Yaitu hanya memiliki hubungan dengan ibu

dan keluarga ibunya saja. Dengan kata lain, hadirnya putusan tersebut telah merubah kedudukan anak dan pada akhirnya dianggap menggeser hukum yang telah ada. Karena pada hakikatnya hukum Islam masih merupakan sebagai hukum normatif yang tidak secara mutlak digunakan sebagai suatu undang-undang. Undang-undang merupakan hukum positif yang memiliki konsekuensi hukum apabila ada pelanggaran terhadapnya. Bisa jadi dengan keberadaan hukum baru yang timbul akibat putusan tersebut pada akhirnya dianggap ada pelegalan terhadap perkawinan yang tidak sah bahkan ada anggapan melegalkan hubungan yang tidak terikat sama sekali dalam pernikahan, hal ini karena keberadaan anak dari hubungan tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bagi mereka yang melakukannya merasa terlindungi dengan keberadaan putusan tersebut.

Dilihat dari sisi fiqh munakahat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dalam putusan tersebut merupakan sebuah perkawinan yang sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat menurut fiqh telah terpenuhi. Artinya, perkawinan tersebut hanya memiliki keabsahan menurut hukum agama dan hanya memenuhi atas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dianggap tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara karena

mengabaikan keberadaan pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terjadi karena perkawinan tersebut hanya memenuhi persyaratan dalam kategori agama dan tidak terpenuhinya persyaratan menurut hukum negara. Yaitu tidak dilakukan pencatatan atas perkawinan tersebut sebagaimana mestinya menurut hukum negara. Hal itu menjadikan perkawinan yang dilakukan Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti otentik atas terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dikategorikan sebagaimana anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan hanya mendapatkan hak dari ibunya sehingga ayahnya tidak memiliki kewajiban terhadap pemenuhan hak anak tersebut.

Telah diketahui bahwa pencatatan perkawinan tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan sebuah perkawinan, karena walau bagaimana pun ketika sebuah perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya menurut fiqih munakahat, maka perkawinan tersebut telah sah. Sehingga segala kewajiban dan hak setelah terjadinya perkawinan tersebut harus terpenuhi sebagaimana mestinya. Termasuk mengenai

kedudukan anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Walau bagaimana pun anak tersebut merupakan anak yang sah karena dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah, meskipun perkawinan itu hanya dianggap sah menurut hukum agama karena tidak adanya pencatatan sebagai bukti atas peristiwa perkawinan tersebut.

Dari keterangan di atas maka jelas bahwa sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu terlahir tidak semata-mata hanya begitu saja tanpa ada pertimbangan. Dengan kata lain bahwa keberadaan anak dalam permasalahan kasus tersebut sebenarnya terlahir dalam sebuah perkawinan yang sah sehingga tidak ada permasalahan apabila anak tersebut memiliki hubungan terhadap ayahnya. Karena walau bagaimanapun anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Karena disebutkan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan secara hukum agama dan dipandang sah oleh hukum tersebut. Karena pada hakikatnya pencatatan hanya merupakan sebuah proses legalisasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Hal ini dilakukan karena negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum

dan salah satu asas yang dianutnya adalah asas legalitas yaitu asas kepastian hukum.

Melihat sebab munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu tidak ada masalah, namun yang perlu digaris bawahi adalah mengenai pertimbangan hukum yang melatar belakangi adanya putusan tersebut. Yakni pertimbangan hukum yang menyebutkan “Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari

peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak”.

Dengan adanya pertimbangan sebagaimana di atas menimbulkan kontroversi yang sangat besar. Karena dengan pertimbangan tersebut berakibat terhadap suatu ikatan perkawinan. Dengan kata lain pertimbangan yang diberikan tersebut menyebutkan meski tidak ada ikatan perkawinan dalam suatu hubungan seksual kemudian melahirkan seorang anak, anak tersebut dapat dikategorikan menjadi anak sah dan dapat terpenuhi haknya oleh seorang laki-laki yang membuahi ibunya dengan pembuktian bahwa dirinya adalah ayah dari anak tersebut. Dengan begitu anak dari hasil perzinahan pun dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Jelas bahwa hal ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam fikih munakahat. Mungkin dapat diberi pemahaman bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang sama sekali tidak memenuhi keabsahan perkawinan baik menurut agama maupun menurut negara bahkan tidak adanya ikatan suatu perkawinan tidak memiliki keterkaitan dalam hal nasab atau keturunan. Hanya saja memiliki hubungan keperdataan di

antara keduanya yaitu anak dan yang menjadi ayahnya, sehingga hak yang harus didapat oleh anak tersebut tidak hanya terpenuhi oleh ibunya dan keluarga ibunya saja akan tetapi ayah biologis dan keluarga dari ayah biologis itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.

Telah dijelaskan dalam fiqih munakahat bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan tentunya hubungan tersebut tidak dimiliki antara anak kepada ayah biologisnya, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan kepada ayah biologisnya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sebagai haknya. Tanpa ada keterkaitan nasab itu bukan berarti terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah biologis, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu hukuman bagi keduanya akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dikarenakan agar siapapun menghindari perbuatan zina tersebut dan mengikatkan diri terhadap perkawinan agar nantinya nasab dari seorang anak yang dilahirkan dapat terjaga dengan baik. Apa yang telah dijelaskan merupakan salah satu dari tujuan sebuah pernikahan, yaitu dengan adanya pernikahan agar bisa menjaga dalam hal kesucian nasab. Walau bagaimanapun tak ada satupun hukum yang membolehkan atau melegalkan suatu perbuatan zina.

Maka, dalam memahami apa yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya semata-mata menyamakannya begitu saja. Akan tetapi harus ada batasan-batasan tertentu yang harus ditentukan sehingga dengan lahirnya putusan tersebut tidak menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan dan tidak melanggar norma yang lainnya sehingga tidak timbul kontroversi dalam masyarakat akibat adanya suatu ketentuan baru.

Setelah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan baru bagi seorang anak dalam sebuah perkawinan. Dilihat dari keterangan diatas klasifikasi terhadap kedudukan anak dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu anak luar perkawinan, anak hasil perkawinan dan anak yang lahir tanpa didahului oleh sebuah perkawinan. lebih jelasnya bahwa anak luar perkawinan adalah anak yang dimaksudkan sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi, yaitu anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang hanya memiliki keabsahan di hadapan hukum agama dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh negara karena perkawinannya tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang ada. anak hasil perkawinan adalah seorang anak yang terlahir dari sebuah ikatan perkawinan yang memiliki keabsahan baik di hadapan hukm agama maupun di hadapan hukum negara. sedangkan

anak yang dilahirkan tanpa didahului oleh perkawinan merupakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan atau yang lebih sering disebut dengan zina.

Keberadaan hukum positif harus memiliki kesesuaian dengan hukum normatif yang hidup di dalam sebuah masyarakat. Karena dengan kesesuaian tersebut maka hukum tersebut akan efektif berada dalam masyarakat sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan aliran sosiological jurisprudence sebagai ajaran dari Eugen Ehrlich (1826-1922) yang dikutip oleh Surjono Sukanto dalam bukunya Pokok-Pokok Sosiologi Hukum "Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Sebagai seorang muslim yang menganut agama Islam, yang segala sesuatunya berkaitan dengan suatu perbuatan telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan telah jelas pula akibat hukumnya atas perbuatan tersebut. Maka dalam melakukan segala sesuatunya harus terlebih dahulu memperhatikan ketentuan yang berlaku baik hukum yang telah ditentukan oleh negara maupun hukum yang telah ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri, yaitu hukum syar'i. Dengan ketentuan yang telah ada maka perbuatan seorang muslim tidak boleh bertentangan

dengan hukum syar'i. Harus ada kesesuaian antara kedua hukum tersebut agar antara keduanya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah perjalanan panjang yang dilakukan dalam penulisan, akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan seorang anak dan hak yang dimilikinya baik menurut fiqih munakahat, Undang-Undang Perkawinan maupun setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dalam fiqih munakahat hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab kepada ayah biologisnya. Hal ini menjadikan anak tersebut hanya saling mewarisi dengan ibunya saja. Pemenuhan hak terhadap anak tersebut pun menjadi kewajiban ibunya. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terikat ke dalam dua bagian saja, yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan memiliki hubungan kepada kedua orang tuanya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. ketentuan tersebut diatur dalam pasal

42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hak bagi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, sedangkan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya menjadi kewajiban bagi ibu dan keluarga ibunya saja.

2. Kedudukan anak setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami perubahan. Di mana pada awalnya seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama dan dianggap tidak sah menurut negara karena tidak dilakukan pencatatan atas perkawinan tersebut, hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dalam hal ini, anak tersebut termasuk ke dalam golongan yang telah disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak yang lahir dalam perkawinan yang telah sah menurut hukum agama meski tidak memiliki keabsahan di hadapan negara, tidak lagi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tapi juga memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, selain itu diberikan pula segala hak sebagaimana hak yang dimiliki oleh anak yang lahir dalam perkawinan sah menurut hukum agama maupun sah di hadapan hukum

negara. Namun terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, yang dengan hal tersebut dapat membuktikan anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Hal di atas, menjadikan hak yang harus terpenuhi bagi anak tersebut bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi ayah dan keluarga ayahnya pun memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak tersebut. Selain itu, anak yang dilahirkan dari hubungan zina tidak menutup kemungkinan untuk memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, tepatnya hubungan tersebut hanya sebatas dalam hubungan keperdataan saja.

Tidaklah dibenarkan apabila Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bermaksud untuk mengesahkan kedudukan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dalam hal ini dari perkawinan yang tidak memiliki keabsahan baik menurut agama maupun dihadapan negara bahkan terhadap suatu hubungan yang sama sekali tanpa didahului oleh perkawinan atau yang lebih dikenal dengan zina. Karena walau bagaimana pun kedudukan anak tersebut telah sangat jelas, yaitu hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Namun tidak bertentangan, apabila

putusan Mahkamah Konstitusi itu diartikan hanya sekedar untuk memberikan hak keperdataan bagi anak tersebut dari ayah biologisnya.

B. Saran

Dalam memaknai sebuah putusan harus dipahami terlebih dahulu tentang bagaimana proses awal ditetapkannya sebuah putusan dan bagaimana pertimbangan yang dilakukan dalam menetapkan, sehingga ketika putusan itu hadir dan telah berkekuatan hukum tetap tidak akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai maksud dan tujuan dari putusan tersebut. Begitu pula dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, haruslah diketahui terlebih dahulu bagaimana proses awal ditetapkannya putusan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai maksud dan tujuan dari keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Abu Sahla & Nurul Nazara. 2011. Buku Pintar Pernikahan. Jakarta: Belanoor.
- Ahmad Mujahidin. 2007. Peradilan Satu Atap di Indonesia. Jakarta: Aditama.
- Ahmad Rofiq. 2003. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alfagerardi. Anak Temuan. Dikutip dari: <http://islamind.blogspot.com/2011/12/anak-temuan.html>.
- Amir Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cetakan ke III. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana.
- Anonimus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Anonimus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3019.

- Anonimus. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4316.
- Anonimus. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Amandemen Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076.
- Anshary MK. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati. 1997. Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah. Bandung: Mandar Maju.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
- Biklen dan Bogdan. 1982 . *Qualitative Research for Education*.
- C.S.T. Kansil. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huku Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Cik Hasan Bisri. 2000. Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Creswell, John W. 1998 *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, London: SAGE Publications.
- Hamuddah 'Abd. Al 'Ati. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryono. 1994. *Sumber Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju <http://id.wikipedia.org>,
- Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lia Hidayati, Anak Zina, Anak Pungut dan Anak Angkat, Dikutip dari: <http://liahidayati.blogspot.com/2012/06/anak-zina-anak-pungut-dan-anak-angkat.html>
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian: di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuqi Yahya. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Al-Maghfiroh.
- Mohammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Jawad Mughniyah. 2007. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Murtadha Mutahhan. 1989. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Yapi.
- Nasution, S. 1988 *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Ridwan AZ. Pengertian Zina, Dampak Negatif Perzinaan dan Cara Menghindarinya, dikutip dari: <http://ridwanaz.com/islami/pengertian-zina-dampak-negatif-perzinaan-dan-cara-menghindari-zina>,
- Roihan A. Rasyid. 1994. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1990. *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: Alma'arif.
- Slamet Abidin & Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXI. Jakarta: Intermasa.
- Sujana & Ibrahim. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1989, hlm. 189
- Umar Mansyur Syah. 1998. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Peraktek*. Garut: Al-Umaro.

Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XXVII No 317 April 2012.

Wasman & Wardah Nuroniyah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Fositif. Yogyakarta: Teras.

Zain Badjeber. 1985. Tanya-Jawab Masalah Hukum Perkawinan. Jakarta: Sinar Harapan.